

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2012)**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

Siti Nur Rochmah

B 200 110 256

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012)**

Yang ditulis oleh :

**NAMA : SITI NUR ROCHMAH
NIM : B 200 110 256**

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Maret 2015

Pembimbing



(Dr. Zulfikar, SE, M.Si.)

Mengetaahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. F. Triana, SE, M.Si.)

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Emipiris Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2012)**

Siti Nur Rochmah

B 200110256

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dapa pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Tengah. Faktor-faktor yang digunakan adalah PAD, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, dan leverage. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2012. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan, belanja modal, ukuran legislatif, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: kinerja keuangan pemerintah daerah, PAD, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, *leverage*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak ditetapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam melaksanakan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah.

Pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri (Juliawati, Darwanis, Jalaluddin, 2012).

Tahap setelah pemerintah daerah melakukan tugas-tugasnya yang dituangkan dalam APBD adalah pengukuran kinerja untuk menilai tugas-tugas yang telah dilakukan. Menurut Mardiasmo (2009:121) “pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik”.

Wood (1998) mengungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai (1) Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan; (2) Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan; (3) Alat komunikasi dengan publik. Selain itu, tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia yang dapat terlihat dengan adanya pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI),

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (*profits* atau *net income*), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja, baik di anggaran (APBD) maupun dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Namun, bukan berarti lebih sedikit pemerintah daerah yang kondisi keuangannya baik dibanding yang buruk, karena surplus/defisit bukanlah kunci utama baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah

PAD (Nasution, 2011), *intergovernmental revenue* (Sesotyaningtyas, 2012), ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* (Sumarjo, 2010).

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012.

II. LANDASAN TEORI

A. Laporan Keuangan dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian daya keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama satu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah (Suyono, 2010 dalam Patriati, 2010).

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (kerangka konseptual akuntansi pemerintah, paragraf 21). Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi sejumlah besar pemakai (Bastian, 2001 dalam Patriati, 2010).

B. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan, perlu dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya. Terdapat beberapa metode dalam analisis laporan keuangan. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Terdapat beberapa jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga darinya dapat dievaluasi kinerja keuangan organisasi dan selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan tertentu (Suyono, 2010 dalam Patriati, 2010).

C. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Patriati, 2010).

Selain menggunakan parameter rasio keuangan pemerintah daerah, juga memakai analisa kinerja keuangan yang telah dikembangkan dan dibangun oleh Musgrave, *et al* dalam Reksohadiprojo (1999). Namun dalam penerapannya, parameter disesuaikan dengan komponen dalam APBD yaitu:

1. Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintahan pusat dan daerah yang diukur dengan menggunakan dua rasio keuangan sebagai berikut:

Total Pendapatan Asli Daerah

Total Penerimaan Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah saerta lain-lain pendapatan yang sah. Total penerimaan daerah merupakan jumlah dari seluruh penerimaan dalam satu tahun anggaran adalah:

Bagi Hasil Pajak atau Bukan Pajak

Total Penerimaan Daerah

Bagi hasil pajak merupakan pajak yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk kemudian didistribusikan antara pusat dan daerah otonomi.

2. Upaya fiskal antara lain adalah:
Total anggaran pendapatan asli daerah merupakan target besarnya pajak daerah yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan berdasarkan kemampuan rasional yang dicapai.
3. Kemandirian/kemampuan pembiayaan antara lain adalah:

Total Pendapatan Asli Daerah

Total Belanja Rutin Non Belanja Pegawai

Belanja rutin non belanja pegawai merupakan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok pelayanan masyarakat yang terdiri dari belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, pengeluaran tidak termasuk bagian lain dan pengeluaran tidak tersangka serta belanja lain-lain.

Total Pajak Daerah (TPjD)

Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang

berlaku dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

4. Efisiensi penggunaan anggaran (kinerja pengeluaran) adalah:

Total Sisa Anggaran (TSA)

Total Belanja Daerah (TBD)

Sisa anggaran (sisa perhitungan anggaran) merupakan selisih lebih antara penerimaan daerah atas belanja yang dikeluarkan dalam satu tahun anggaran ditambah selisih lebih transaksi pembiayaan penerimaan dan pengeluaran, yaitu:

Total Pengeluaran Lain (TPL)

Total Belanja Daerah (TBD)

Pengeluaran lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pengeluaran tidak termasuk bagian lain ditambah dengan pengeluaran tidak terduga yang direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Total belanja daerah merupakan jumlah keseluruhan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran yang membebani anggaran daerah.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi (UU NO. 33/2004).

Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dll.
- 2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengelolaan limbah cair, dll.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD, bagian laba atas

penyertaan modal pada [perusahaan milik negara / BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

- 4) Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33/2004). Menurut (Halim, 2002) dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Keuangan Daerah" dijelaskan bahwa Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Pemerintah pusat dalam undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan yaitu:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH). Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Bagi Hasil bersumber dari :

- a. Pajak, seperti : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
 - b. Sumber Daya Alam, seperti : Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2006 dalam Christy dan Adi, 2008). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi

manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual (Putro, 2010).

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) setiap tahunnya sedangkan PDRB dapat diukur atas dasar harga konstan di suatu daerah, (Maryanti dan Endrawati, 2009).

5. Ukuran Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) atau anggota legislatif bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. Banyaknya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah (Sumarjo, 2010).

6. Leverage

Leverage adalah Perbandingan antara utang dan modal. Sebagaimana semakin besar *leverage* maka semakin besar ketergantungan entitas pada pihak luar karena semakin besar utang yang dimiliki entitas tersebut maka semakin rendah kinerja keuangan entitas tersebut. Menurut Wild, dkk (2005) *leverage* dapat diukur dengan *total debt ratio*, *total debt to equity*, *long-term debt to equity ratio* ((Kusumawardani, 2012).

E. Metode Penelitian

a. Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi empiris karena data yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang menggunakan data ini sebelumnya. Lingkup penelitian ini adalah studi empiris pada instansi pemerintah daerah tingkat kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

b. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data keuangan pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun anggaran 2009-2012. Sampel penelitian ini adalah APBD pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2009-2012, sehingga diperoleh data sebanyak 140 tahun anggaran (35 x 4 periode tahun anggaran). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan purposive sampling, dimana sampel diambil secara tidak acak dan dipilih berdasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu.

c. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota tahun 2009-2012 serta data non keuangan, seperti jumlah anggota DPRD. Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang kemudian dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Data LKPD yang dikumpulkan diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2009-2012 oleh BPK RI, melalui situs www.bpk.go.id, sedangkan data non keuangan diperoleh dari website resmi pemerintah daerah Jawa Tengah.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD dipemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

e. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari 2 variabel meliputi: (1) variabel dependen: kinerja keuangan pemerintah daerah (2) variabel independen: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, dan *leverage*.

F. Metode Analisis Data

1. Pengujian asumsi klasik

a. Uji Normalitas

Untuk mengetahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila signifikansi hitung $> 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2001).

b. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel independen lain didalam model regresi, dapat dilihat dalam nilai VIF > 10 dan angka tolerance $< 0,10$ (Ghozali, 2001).

c. Uji Heterokedastisitas

Untuk menguji ada tidaknya gejala heterokedastisitas dalam model regresi, dengan menggunakan uji glejser. Pengujian heterokedastisitas dalam membandingkan t-hitung yang diperoleh dengan t-tabel, jika t-hitung $< t$ -tabel maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2001).

d. Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah dalam regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Cara yang digunakan untuk mendiagnosa adanya autokorelasi melalui terjadinya nilai Durbin-Watson (DW) (Ghozali, 2001).

2. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dengan variabel terkait.

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independensi mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan *level of significant* (α) 0,05, makakesimpulannya apabila signifikansi Fhitung > 0,05 berarti terdapat pengaruhsecara simultan dan sebaliknya. Apabila Fhitung > Ftabel, maka dapatdisimpulkan bahwa model regresi sudah fit.

Koefisien Determinasi (*R Squared*) menunjukkan seberapa besarprosentase variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan olehvariasi dalam variabel independen.Nilai R2 terletak antara 0 dan 1, jikaR2 semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam variableindependen.

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masingmasingvariabel independen terhadap variabel dependen. Pengujianmenggunakan *level of significant* (α) 0,05. Jika thitung > ttabel, maka H0ditolak berarti ada pengaruh antara variabel independen dengan variabledependen dan sebaliknya.

Model regresi berganda yang digunakan untuk pengujian hipotesisadalah:

$$\text{KINERJA} = \alpha + \beta_1\text{PAD} + \beta_2\text{DAPER} + \beta_3\text{BM} + \beta_4\text{PDRB} + \beta_5\text{LEGISLATIF} + \beta_6\text{LEV} + e$$

Keterangan :

KINERJA : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAPER : Dana Perimbangan

BM : Belanja Modal

PDRB : Pertumbuhan Ekonomi

LEGISLATIF : Ukuran Legislatif

LEV :Leverage

VI. HASIL PENELITIAN

A. Statistik Deskriptif

Dengan bantuan SPSS versi 16.0 dibuat tabel statistik deskriptif sebagai berikut:

Deskripsi Data Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	120	32238,00	779617,00	106915,383	86846,695
DAPER	120	285799,00	1250042,00	711979,125	1,99818E5
BM	120	25479,00	351854,00	137360,258	67175,5928
PDRB	120	869452,99	24196487,87	4,8669E6	4,22275E6
LEGISLATIF	120	25,00	50,00	44,1000	7,54750
LEV	120	0,000	0,04980	0,0041136	0,00649380
KINERJA	120	542859	30,70241	10,3793942	4,24337653

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 16.0

Dari hasil perhitungan statistik deskriptif dapat diketahui bahwa dari 30 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah variabel

pertumbuhan ekonomi memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Setelah dilakukannya uji statistik terdapat data yang tidak terdistribusi dengan normal, sehingga dibutuhkan metode trimming yaitu membuang data outliers sebanyak 20 sampel. Sehingga data penelitian final menjadi sebanyak 100 sampel.

B. Analisis Data

1. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas

Model	Kolmogorov-Smirnov Z	Probability (p)	Kriteria a	Simpulan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,430	0,993	$p > 0,05$	Normal

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 16.0

Dari hasil perhitungan uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$), yaitu sebesar 0,993 maka data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,339	2,946	tidak terjadi multikolinearitas
Dana Perimbangan (DP)	0,333	3,000	tidak terjadi multikolinearitas
Belanja Modal (BM)	0,597	1,675	tidak terjadi multikolinearitas
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	0,530	1,888	tidak terjadi multikolinearitas
Ukuran Legislatif (UL)	0,592	1,690	tidak terjadi multikolinearitas
Leverage (LEV)	0,965	1,036	tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 16.0

Dari hasil perhitungan menunjukkan tidak ada korelasi sempurna antar variabel independen dari beberapa variabel $VIF > 10$ dan angka tolerance $< 0,10$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Kriteria	p-value	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$> 0,05$	0,868	tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana Perimbangan	$> 0,05$	0,063	tidak terjadi

(DP)			heteroskedastisitas
Belanja Modal (BM)	> 0,05	0,887	tidak terjadi heteroskedastisitas
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	> 0,05	0,092	tidak terjadi heteroskedastisitas
Ukuran Legislatif (UL)	> 0,05	0,367	tidak terjadi heteroskedastisitas
Leverage (LEV)	> 0,05	0,424	tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 16.0

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa hasil signifikansi variabel independen menunjukkan angka lebih dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi penelitian, sehingga model regresi layak untuk dipertimbangkan tingkat materialitasnya.

d. Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

D-W	du	4-du	Simpulan
1,848	1,8031	2,1989	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 16.0

Dari hasil uji autokorelasi, diperoleh nilai D-W sebesar 1,848. Dengan demikian diketahui bahwa $du < dw < 4-du$ maka hasilnya menunjukkan kriteria tersebut terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian tidak terjadi autokorelasi.

2. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Hasil Uji Regresi

Variabel	Koefisien	t-hitung	Sign.	Simpulan
Konstanta	12,695			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5,851E-5	18,742	0,000	Berpengaruh Signifikan
Dana Perimbangan (DAPER)	-9,343E-6	-12,142	0,000	Tidak Berpengaruh Signifikan
Belanja Modal (BM)	-1,551E-6	-1,021	0,310	Tidak Berpengaruh Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	9,279E-8	2,943	0,004	Berpengaruh Signifikan
Ukuran Legislatif (LEGISLATIF)	-0,052	-3,131	0,002	Tidak Berpengaruh Signifikan
Leverage (LEV)	5,539	0,502	0,617	Tidak Berpengaruh Signifikan
F-hitung = 124,727				
Adjusted R Square = 0,882				

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 16.0

$$\text{KINERJA} = 12,695 + 5,851\text{E-}5 \text{ PAD} - 9,343\text{E-}6 \text{ DAPER} - 1,551\text{E-}6 \text{ BM} + 9,279\text{E-}8 \text{ PDRB} - 0,052 \text{ LEGISLATIF} + 5,539 \text{ LEV} + e$$

Kekuatan hubungan yang terjadi diantara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 12,695, artinya jika pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, dan *leverage* nilainya 0 maka kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 12,695.
- 2) Koefisien regresi pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kinerja keuangan pemerintah daerah atau menerima H_1 . Nilai koefisien sebesar 5,851E-5 yang berarti memiliki arah yang saling sama terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($18,742 < 1,9858$) dengan signifikansi 0,000 ($p < 0,05$).
- 3) Koefisien regresi dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kinerja keuangan pemerintah daerah atau menolak H_2 . Nilai koefisien sebesar -9,343E-6 yang berarti memiliki arah yang saling bertolak belakang terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($-12,142 < 1,9858$) dengan signifikansi 0,000 ($p < 0,05$).
- 4) Variabel belanja modal memiliki nilai t-hitung dengan nilai sebesar -1,021 lebih kecil dari t-tabel yaitu 1,9858 dan signifikansi 0,310 ($p > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, sehingga H_3 ditolak.
- 5) Hasil pengujian menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi memiliki t-hitung dengan nilai sebesar 2,943 lebih besar dari t-tabel yaitu 1,9858 dan signifikansi 0,004 ($p < 0,05$). Koefisien bernilai positif yang ditunjukkan dalam tabel memperlihatkan adanya hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga H_4 dinyatakan diterima.
- 6) Koefisien ukuran legislatif bernilai -0,052 menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai arah yang negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel ukuran legislatif memiliki t-hitung dengan nilai sebesar -3,131 lebih kecil dari t-tabel yaitu 1,9858 dan signifikansi 0,002 ($p < 0,05$). Maka dapat disimpulkan H_5 ditolak, hal ini menunjukkan ukuran legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 7) Hasil pengujian menunjukkan variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Leverage* memiliki t-hitung dengan nilai sebesar 0,502 lebih kecil dari t-tabel yaitu 1,9858 dan signifikansi 0,617 ($p > 0,05$). Koefisien bernilai positif yang ditunjukkan dalam tabel memperlihatkan adanya

hubungan yang positif antara *leverage* dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, sehingga H_6 dinyatakan ditolak.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Hasil Uji Simultan (Uji F)

F-hitung	Sign.	Simpulan
124,727	0,000	H_0 ditolak

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 16.0 (Lampiran 2)

Dari hasil analisis uji F pada model regresi diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 124,727 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas F hitung sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak.

c. Koefisien Determinan (R^2)

Hasil Koefisien Determinan (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,943	0,889	0,882

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 16.0

Berdasarkan tampilan output SPSS pada tabel 4.10 diatas, diperoleh nilai *adjusted* R^2 yaitu 0,882. Hal ini berarti 88,2% variasi model dapat dijelaskan oleh variasi dari enam variabel independen. Sedangkan sisanya sebesar 11,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah dilakukan pengujian dan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian pada model regresi, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai t-hitung sebesar 18,742 lebih besar dari t-tabel yaitu 1,9858 dengan signifikansi 0,000 ($p < 0,05$) maka **H1 diterima**. Artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Hasil penelitian pada model regresi, variabel Dana Perimbangan (DAPER) mempunyai nilai t-hitung sebesar -12,124 lebih kecil dari t-tabel yaitu 1,9858 dengan signifikansi 0,000 ($p < 0,05$) maka **H2 ditolak**. Artinya variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Hasil penelitian pada model regresi, variabel Belanja Modal (BM) mempunyai nilai t-hitung sebesar -1,021 lebih kecil dari t-tabel yaitu 1,9858 dengan signifikansi 0,310 ($p > 0,05$) maka **H3 ditolak**. Artinya variabel Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Hasil penelitian pada model regresi, variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) mempunyai nilai t-hitung sebesar 2,943 lebih besar dari t-tabel yaitu 1,9858 dengan signifikansi 0,004 ($p < 0,05$) maka **H4**

diterima. Artinya Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

5. Hasil penelitian pada model regresi, variabel Ukuran Legislatif (LEGISLATIF) mempunyai nilai t-hitung sebesar -3,131 lebih kecil dari t-tabel yaitu 1,9858 dengan signifikansi 0,002 ($p < 0,05$) maka **H5 ditolak.** Artinya Ukuran Legislatif berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
6. Hasil penelitian pada model regresi, variabel Leverage (LEV) mempunyai nilai t-hitung sebesar 0,502 lebih kecil dari t-tabel yaitu 1,9858 dengan signifikansi 0,617 ($p > 0,05$) maka **H6 ditolak.** Artinya Leverage berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
7. Berdasarkan hasil uji R^2 , variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAPER), Belanja Modal (BM), Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Ukuran Legislatif (LEGISLATIF) dan Leverage (LEV) proporsinya cenderung kurang dominan dalam mempengaruhi kisaran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KINERJA) yaitu hanya 88,2%. Artinya masih banyak variabel-variabel lain yang dapat menjelaskan atau mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Memperluas objek penelitian yaitu dengan menambah variabel-variabel inti selain variabel yang digunakan agar hasilnya dapat terdefinisi dengan lebih sempurna.
2. Menambah tahun sampel pengamatan dengan cara memilih sampel yang sekiranya bisa representatif dalam menjelaskan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Memperluas objek penelitian dengan cara menambah sampel penelitian dari kota maupun kabupaten yang berada di provinsi lain mengingat ada 33 provinsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Julitawati, Ebit., Darwanis, dan Jalaluddin, 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Volume 1, Tahun 1, No. 1*.

- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal 1 (1)*.
- Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, *tentang Penerimaan Daerah*.
- Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maryanti, Ulfi dan Endrawati, 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alikasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus di Sumatera Barat*. Jurnal Akuntansi.
- Patriati, Ratri. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Putro, Nugroho Suratno, 2010. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sumarjo, Hendro, 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia). *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.